

LKPJ TA 2022

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

PENGASIH (KR)-Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Hal itu dikatakan Pj Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana MSI pada Rapat Paripurna (Rapur) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2022, di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulonprogo, Rabu sore (15/3).

"Tahun Anggaran 2022 masih melanjutkan penanganan Covid-19 dan dampaknya serta dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah mengalokasikan belanja wajib sebesar 2 persen bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya pada triwulan IV senilai Rp 3.400.332.559 guna mendukung sosial periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022," kata Tri Saktiyana.

Tri Saktiyana menguraikan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui program pemba-



KR-Widiastuti

Pelaksanaan Rapur Penyampaian LKPJ TA 2022.

ngunan infrastruktur, program pengembangan kawasan dan program prioritas pembangunan lainnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Program Prioritas Pembangunan terdapat 17 program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 7 diantaranya berlokasi di Kabupaten Kulonprogo yaitu : pembangunan Jalan Temon-Borobudur, pembangunan SPAM Regional Kamijoro; penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto; pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY; pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh; pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulonprogo; serta pengembangan Jogjakarta Agro Park (JAP).

Terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2022, dijelaskan Tri Saktiyana, saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK RI. Angka capaian keuangan tersebut, bahwa Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2022 (unaudited) sebesar Rp

1.530.235.035.264,32 dari target sebesar Rp1.503.689.361.733 atau mencapai 101,77 persen. Realisasi pendapatan daerah itu berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE menyatakan beberapa target dalam RPJMD sudah baik, di atas target, namun ada beberapa yang tidak tercapai target. Indikator ketercapaian kinerja OPD sudah baik, ini sudah menunjukkan perkembangan.

"Sedang terkait tujuh prioritas program dari DIY di Kulonprogo, diantaranya pembangunan Tanjung Adikarto dan Jogjakarta Agro Park

(JAP) belum ada perkembangan lebih lanjut," kata Akhid sambil menambahkan setelah menerima penyampaian LKPJ TA 2022, maka selanjutnya diserahkan kepada segenap Anggota DPRD untuk dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (Wid)-f

RATUSAN ORANG MENINGGAL

Masih Membayar BPJS FBI

WONOSARI (KR)- Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi mengingatkan pemerintah untuk melakukan update kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebab dalam pendataan sementara banyak orang yang meninggal dan pindah tempat masih membayar iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Data Dinsos ada sekitar 800 orang meninggal dan ratusan yang pindah iurannya masih dibayar dengan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Diperlukan data terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)," kata Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs Supriyadi dalam rapat dengan pendamping dengan Dinas Sosial di ruang komisi, Rabu (15/3).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Ir Asti Wijayanti MSI dan jajarannya, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs Eka Wijang Aswarna MSI. Sedangkan dari Komisi D

selain ketuanya hadir juga Wakil Komisi Ari Siswanto SE, Anwarudin SIP dan Sukardi. Keterpaduan lewat aplikasi Dukcapil dan Dinsos ini seharusnya segera bisa dilakukan, sehingga ketika Dukcapil

menerbitkan surat kematian atau warga pindah tempat langsung terkoneksi dengan data di Dinas Sosial. Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten smart city teknik tersebut mestinya tidak

sulit. Sementara anggota Komisi D Aris Siswanto SE update data BPJS PBI ini harus segera dilakukan sehingga pemerintah tidak membayar iuran orang yang sudah meninggal atau pindah tempat. Anggarannya dapat dipindahkan kepada warga yang tidak mampu tetapi belum tercover BPJS. "Anggaran APBD untuk pembayaran BPJS PBI sekitar Rp 40 miliar," tambahbnya. (Ewi)-f



Rapat Komisi D DPRD Gunungkidul dengan Dinas Sosial

KR-Endar Widodo

MUSIM TANAM JANUARI-MARET

Hasil Panen Disimpan untuk Cadangan Pangan

WONOSARI (KR) - Hasil produksi padi di Kabupaten Gunungkidul musim tanam pertama tahun 2023 tercatat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY mencapai 5,08 ton per hektare. Untuk total luas lahan padi yang sudah panen di Gunungkidul mencapai 47.527 ha dengan total produksi padi mencapai 241.437 ton gabah kering giling (GKG). Kepala DPKP DIY, Sugeng Purwanto mengatakan jika produktivitas padi di Gunungkidul kategorinya cukup baik. "Angka produksi ini kami catat hasil panen sepanjang Januari-Maret 2023,"

katanya, Kamis (16/3).

Menurut Sugeng, hasil produksi padi yang dipanen petani ini setara dengan 152.588 ton beras. Sebagian besar hasil panen ini disimpan oleh petani sebagai cadangan pangan dalam bentuk gabah.

Setidaknya untuk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecukupan pangan selama 6 sampai 8 bulan ke depan. Sedangkan varietas jenis padi yang ditanam di Gunungkidul beragam. Seperti varietas Cihayang, Supadi, MAPAN 05, Situ Bagendit, dan Inpari 42. "Kami mengapresiasi hasil panen tersebut. Sebab selain

untuk Gunungkidul, hasil ini juga menjaga ketahanan pangan DIY," imbuhnya.

Bupati Gunungkidul H Sunaryanta menyatakan jika para petani memberikan kontribusi sangat besar dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Pihaknya memastikan perhatian pada sektor pertanian tetap jadi prioritas. Salah satunya lewat distribusi pupuk bersubsidi.

"Sudah ada tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pusat untuk tahun ini, sehingga mencukupi kebutuhan petani," ujarnya. (Bmp)-f

KOMITMEN BERSAMA MEMAJUKAN BANGSA

Gandung Pardiman Silaturahmi PDM Gunungkidul

WONOSARI (KR) - Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM bersilaturahmi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gunungkidul di Kantor PDM Wonosari, Rabu (15/3). Kedatangan rombongan disambut Ketua PDM Gunungkidul H Sadmonodadi beserta jajaran pengurus. "Pertemuan ini merupakan silaturahmi, saling berdiskusi berkaitan banyak hal. Karena PDM dengan Golkar ini memiliki visi yang sama. Termasuk sama-sama memiliki komitmen untuk bagaimana ikut memajukan bangsa," kata Ketua DPD Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM.

Turut mendampingi Ketua Yayasan GPC Syarif Guska Laksana SH, jajaran pengurus DPD Golkar DIY Agus Subagyo, Erwin Nizar, Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho SS, Fraksi Partai Golkar Gunungkidul Gunawan SE, Eri Agustini dan Sarjana SE. Dalam pertemuan tersebut, HM Gandung Pardiman MM menyatakan akan menggalakkan ayo mengaji. Gerakan ayo mengaji akan digelar di GPC Sport Genjahan Ponjong, Selasa (21/3) pukul 12.00 WIB de-

ngan hadiah utama umroh untuk 2 orang. i Gerakan Ayo Mengaji ini sebagai jawaban statement miring soal pengajian ibu-ibu. Padahal kegiatan pengajian ini sangat memberikan manfaat dan baik menambah wawasan dan siraman rohani," ujarnya.

Pertemuan berlangsung cukup akrab. Karena Muhammadiyah memiliki kedekatan dengan Partai Gol-

kar. Ketua PDM Gunungkidul H Sadmonodadi menyambut baik kedatangan rombongan Partai Golkar. Karena tentunya akan mempererat hubungan, serta bisa bersama sama untuk memajukan masyarakat mau pun memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. i Partai Golkar dan Muhammadiyah sama sama memiliki visi dalam memajukan masyarakat," jelasnya. (Ded)-f



HM Gandung Pardiman bersama rombongan beserta pengurus PDM.

KR-Dedy EW

SMAN I GIRIMULYO

Selenggarakan Pendidikan Karakter dan Kerja Sosial

GIRIMULYO (KR)- SMAN I Girimulyo menyelenggarakan Pendidikan Karakter dan Bela Negara, dan Kerja Sosial. Pendidikan Karakter dan Bela Negara bagi siswa kelas X di Batalyon Infanteri Mekanis 403/Wirasada Pratista berlangsung Kamis-Sabtu (16-18/3). Sedangkan Kerja Sosial diperuntukkan Kelas XI dan XII dilaksanakan di tempat-tempat ibadah dekat rumah siswa-siswi, Kamis-Jumat (16-17/3).

Kepala SMAN I Girimulyo Agus Iswanto mengatakan, Pendidikan Karakter dan Bela Negara sangat penting bagi perkembangan siswa-siswi di masa datang. "Di sini, paling kelihatan anak-anak kurang disiplin. Kedua, kurang memiliki unggah-

ungguh. Anak-anak itu sering membantah langsung. Harapan kami, setelah mereka mendapat pembinaan di Yonif 403, akan memiliki karakter yang bagus," kata Agus Iswanto, Kamis (16/3).

Agus menambahkan, Pendidikan Karakter dan Bela Negara yang dirancang sekolah bersama Komite Sekolah, ini prinsipnya wajib. Sehingga siswa-siswi yang belum mengikuti tahun ini, mereka wajib tahun depan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat siswa. Kalau dari sisi ilmu mata pelajaran kurang, tetapi dari sisi akhlak dan ilmu kemasyarakatan memiliki keunggulan. "Kalau mereka karakternya baik, di mana-mana bisa diterima

kerja," katanya.

Sedang Kerja Sosial, menasar tempat-tempat ibadah yang berada di dekat rumah siswa-siswi. Bagi siswa Islam ke masjid atau musala, sedangkan siswa non Islam ke gereja.

Yang penting tidak membatalkan siswa. "Kami telah berkomunikasi

dengan pengurus masjid, musala atau gereja tentang apa yang bisa dibantu dari siswa-siswi SMAN I Girimulyo. Kita memberikan waktu selama dua hari. Kalau satu hari sudah cukup ya sudah. Tetapi kalau satu hari tidak cukup dapat dilanjutkan besok pagi," pungkas Agus. (Wid)-f



Agus Iswanto melepas peserta Pendidikan Karakter dan Kerja Sosial.

KR-Widiastuti

108 Penyandang Disabilitas Terima Alat Bantu

WONOSARI (KR)-Sebanyak 108 penyandang disabilitas mendapatkan bantuan alat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul melalui anggaran APBD 2023. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asty Wijayanti memaparkan, bantuan tersebut diterima penyandang disabilitas di 14 Kapanewon. "Bantuan berupa 5 jenis alat bantu dengar, kursi roda dan tongkat tuna netra," katanya, Rabu (15/3).

Untuk Alat Bantu Dengar sebanyak 36 unit. Kursi roda 54 unit, kursi roda 12 unit dan tongkat tuna netra sebanyak 6 buah. Sedangkan Kapanewon yang menerima bantuan tersebut

diantaranya Gedangsari 15, Girisubo 15, Karangmojo 2, Paliyan 9, Patuk 2, Playen 10, Ponjong 8, Purwosari 2, Rongkop 2, Saptosari 5, Semanu 11, Semin 13, Tepus 5 dan Wonosari 9. "Dengan bantuan alat tersebut diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta mengatakan, bantuan alat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan kedepan bisa digunakan warga lain yang membutuhkan. "Jadi alat alat seperti ini bisa diinventarisir kedepannya bisa digunakan warga lain jika penerima bantuan saat ini sudah tidak membutuhkan lagi.

Selain bantuan alat Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan permakanan, bantuan akan diberikan bagi lansia telantar dan disabilitas lainnya. "Bantuan permakanan tersebut nanti akan diberikan dalam bentuk makanan siap makan dan masing-masing kapanewon akan dibentuk pokmas," ujarnya. (Bmp)-f



KR-Bambang Purwanto

Bupati H Sunaryanta serahkan bantuan alat bantu disabilitas.

TAHUN ANGGARAN 2023

Pemkab Naikkan Alokasi Dana Desa

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) kalurahan Tahun Anggaran (TA) 2023 bersumber dari APBD.

Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Nani Asyfiyah, mengatakan kenaikan ini sebut terjadi setiap tahun. "Untuk tahun ini ADD dialokasikan sebesar sebesar Rp 112,4 miliar," katanya, kemarin.

Diakunya kenaikan tersebut cukup besar dibanding dengan ADD tahun lalu yang mencapai Rp 105 miliar. ADD ini digunakan untuk membiayai operasional kalurahan, diantaranya untuk membayar penghasilan tetap para pamong kalurahan yang pencairannya dilakukan setiap bulan. Tetapi juga bergantung pada keaktifan dari masing-masing kalurahan. (Bmp)-f

Namun dia memastikan tidak ada masalah dengan pencairan ADD. Pihaknya saat ini sudah mencairkan ADD untuk termin kedua. "Sampai saat ini pencairan cukup lancar," ujarnya.

Adapun besaran ADD tiap kalurahan bervariasi masing-masing kalurahan juga tidak sama. "Sebagaimana terjadi di Bendung di Kapanewon Kapanewon Semin tahun ini mendapatkan ADD sebesar Rp 800 juta. Menurut keterabgan Lurah Bendung Didik Rubiyanto pihaknya menerima alokasi sekitar Rp 800 juta.

Untuk penggunaan ADD sudah sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dari alokasi dana yang diterima, pihaknya juga mengaku sudah mencairkan untuk termin kedua. "Termin kedua dari ADD ini juga sudah disalurkan untuk penghasilan tetap (siltap) pamong kalurahan," ujarnya. (Bmp)-f